

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara
Kreditor, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian
Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999)
Fred B.G. Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan:
Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001)
Kartini Muljadi, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak
Hukumnya*” dalam Rudy A. Lontoh, et al
L.G.N. Soegangga, *Pengantar Hukum Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994)
M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*,
(Jakarta, Kencana, 2008)
Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2010)
Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII
Press, 2013)
Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh, *Hukum Kepailitan:
Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban
Pembayaran, Ed.1, Cet.1*, (Bandung: Alumni, 2001)
Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012)

Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014)

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014)

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1996)

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134K/Pdt.Sus-PKPU/2014 tanggal 29 Oktober 2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 135K/Pdt.Sus-PKPU/2014 tanggal 29 Oktober 2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 156K/Pdt.Sus-PKPU/2014 tanggal 13 Mei 2014

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 September 2013

SKRIPSI / TESIS

Kemala Atika Hayati, “Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. TESIS, Medan: Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.

BERITA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*MK Bolehkan Upaya Hukum Kasasi Bagi Putusan PKPU*”, <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17869>>, diakses 23 September 2021

JURNAL

Artidjo Alkostar, “Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Varia Peradilan* No. 281, (2009).

Asep Bambang Hermanto, “Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya”, *Jurnal Hukum Selisik*, Vol. 2, No. 4 (2016) DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i2.650>

- Darwim Bruce Anzward dan Sri Endang Rayung Wulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pt. Asmin Koalindo Tuhup”, *Jurnal De Facto*, Vol. 5, No. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v5i2.55>
- Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2 (2018), DOI: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>
- Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, No. 4, (2013)
- Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015), DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Gunardi Lie, *et. al.*, “Problematic UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis”, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2019) DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242>
- Novita Sari, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 2 (2017), DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i02.p02>

WEBSITE

- Hukum Online, “Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ade9a469d120/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap>, diakses 10 Agustus 2021

KAMUS

- Black Law’s Dictionary
Kamus Besar Bahasa Indonesia

WAWANCARA

- Hasil Wawancara dengan Revi Laracaka, S.H., Partner dan Kurator di JB Law Office, Gunawarman, 17 Desember 2021, Pukul 16.50 WIB